BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu syarat untuk tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan yaitu tejaminnya ketersediaan lahan dan sumberdaya air. Dengan demikian perlu dilakukan upaya pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang baik adalah pengelolaan yang berkelanjutan yang berdasarkan pada azas manfaat dan azas kelestarian. Pengelolaan lahan dengan memperhatikan kedua azas tersebut akan dapat melestarikan fungsi lahan, sehingga kegiatan usahatani dapat berkelanjutan dan petani sebagai masyarakat tani dapat terus beraktivitas.

Dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, seluruh aspek baik aspek ekologis, ekonomi maupun aspek sosial perlu dipertimbangkan. Pada dasarnya prinsip pertanian yang berkelanjutan adalah mengelola lahan dengan keseimbangan ekologi yang sehat, sesuai dengan kemampuan lahan yang ada, dengan menggunakan teknologi dan praktek-praktek bertani yang mempunyai dampak negatif yang sekecil mungkin tetapi mampu mempertahankan ataupun meningkatkan tingkat produksi pertanian yang menguntungkan.

Keberadaan lahan dan sumber daya air, tidak dapat dipungkiri merupakan aspek penting dan strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Akan tetapi persoalan lahan kritis dan sumber daya air (SDA) di Indonesia sampai saat sekarang terus terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berlangsungnya kegiatan pembangunan. Data Direktorat Perencanaan dan Evaluasi PDAS, Kementerian Kehutanan (2011) menunjukkan bahwa luas areal lahan kritis di Indonesia mencapai 78.429.550 ha, dengan 48.707.516 ha berada di dalam kawasan hutan, dan 29.722.034 ha berada di luar kawasan hutan. Kategori lahan sangat kritis ada 5.269.259 ha, kritis 22.025.581 ha, dan agak kritis 51.134.710 ha. Sedangkan khusus Luas lahan kritis di seluruh Sumatera Barat saat ini mencapai luas 551.387 hektar namun yang telah disurvei baru 214.580 hektar (Bapeda Sumatera Barat dalam Laporan Profil Program PLKSDA-BM,2014 :3).

Peningkatan lahan kritis dan berkurangnya potensi sumber daya air telah berdampak pada munculnya beberapa konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Berdasarkan hasil studi LP3ES (2002), tercatat lebih dari 157 kasus konflik dalam penggunaan air yang terjadi antar petani, swasta dan pemerintah. Untuk itu penanganan lahan kritis dan sumber daya air perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat supaya memberikan hasil yang optimal untuk konservasi dan peningkatan kesejahtaraan (Direktorat Jendral BAPPEDA,2013:1).

Untuk itu dirancang model pengelolaan lahan kering (lahan kritis) serta sumberdaya air yang berkelanjutan yang dapat melestarikan fungsi lahan. Direktorat Jenderal Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Program Pengembangan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PPLKSDA-BM) sejak tahun 2012. Sebagai solusi dari permasalan tersebut, tujuan dari Program PLKSDA-BM adalah untuk memperbaiki lahan berpotensi kritis menjadi lahan produktif yang menghasilkan nilai ekonomis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan melibatkan kerjasama dengan multipihak (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM) dengan sasaran, meliputi : a) Meningkatnya produktivitas lahan pada lokasi *pilot project*, b)Terciptanya area resapan air,c) Meningkatnya pendapatan masyarakat/petani peserta program dan pihak lain yang terlibat program dalam jangka panjang, d) Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Kelompok Tani pengelola lahan kritis, e) Meningkatkan kerjasama multipihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pemerintah, f) Meningkatnya pendapatan asli daerah dari hasil produktifitas lahan (Profil PLKSDA-BM Sumbar,2013:2-3).

Berdasarkan tujuan program PLKSDA-BM, maka program ini sangat membutuhkan partisipasi perserta pelaksana program. Keberhasilan program PLKSDA-BM sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi peserta pelaksana program. Karena menurut Santunnia (2015 :3) menyatakan bahwa partisipasi aktif peserta pelaksana program menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan apakah suatu program berhasil dilaksanakan atau tidak.

Meskipun konsep partisipasi kelihatanya sederhana, tetapi pelaksanaanya tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu sangatlah susah, rendahnya partisipasi masyarakat akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam menjalankan proses partisipasi yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat maupun stakeholder yang terlibat (Melisa, 2010:3).

B. Perumusan Masalah

Di Sumatra Barat, Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang ditunjuk untuk menjalankan program PLKSDA-BM. Jumlah lahan kritis di Kabupaten Tanah Datar 27.210 hektar (Profil PLKSDA-BM Sumbar,2013). Salah satu lokasi PLKSDA-BM di Kabupaten Tanah Datar untuk tahun anggaran 2013 adalah Nagari Paninjauan Jorong Tabu Baraie Kecamatan X Koto. Dimana lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan program adalah milik 8 kaum Kelompok Tani Talago Katiak. Lahan dikelola oleh Kelompok Tani Talago Katiak dengan jumlah anggota Kelompok tani berjumlah 25 orang dengan 1 orang ketua kelompok tani. Luas lahan program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) seluas 5 Ha (BAPPEDA Tanah Datar, 2013: 19).

Berjalannya suatu program pemerintah tidak lepas dari permasalahan. Baik permasalahan itu muncul saat program tersebut sedang dirumuskan maupun program tersebut sedang dilaksanakan dilapangan. Berdasarkan hasil survei pendahuluan (Agustus 2015), permasalahan yang ditemukan pada daerah objek penelitian adalah masih kurangnya tingkat partisipasi beberapa anggota kelompok tani Talago Katiak dalam menjalankan program PLKSDA-BM. Menurut petugas TPM dan Ketua Kelompok Tani Talago Katiak, bentuk kurangnya partisipasi beberapa anggota kelompok tani yaitu : (1) Beberapa anggota jarang ikut serta dalam kegiatan rutin gotong royong membersihkan lahan tempat program PKLSDA-BM dilakukan, (2) Pada saat musyawarah, beberapa anggota kelompok tani kurang berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan untuk kelancaran kegiatan program PLKSDA-BM, (3) Lahan tempat program PLKSDA-BM

dilaksanakan kurang dikelola dengan baik (bersemak kembali) di beberapa lahan milik beberapa anggota kelompok tani.

Partisipasi peserta dalam setiap program pembangunan merupakan peran penting dalam upaya mencapai tujuan program. Selain itu, keberhasilan suatu program tidak hanya dapat dilihat dari keikutsertaan peserta saat program itu sedang berjalan, melainkan bagaimana keberlanjutan peserta dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan dalam kelompok tani setelah program itu berakhir (Jalieli,2013:3).

Pentingnya partisipasi juga dikemukakan oleh Conyers (1991) dalam Fahrizen (2010 : 19) sebagai berikut : *Pertama*, Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiranya proyek atau program pembangunan akan gagal; *Kedua*, bahwa masyarakat lebih mempercayai proyek atau pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek atau program tersebut dan akan memiliki terhadap proyek atau program tersebut; *Ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Dengan demikian, besar atau tidaknya tingkat partisipasi anggota kelompok tani Talago Katiak pada program PLKSDA-BM akan menentukan sukses atau tidaknya program PLKSDA-BM tersebut diterapkan dilapangan.

Bertitik tolak dari pemasalahan di atas diperlukan suatu penelitian yang mengkaji berapa besar tingkat partisipasi anggota kelompok tani Talago Katiak dalam menjalankan program PLKSDA-BM dan bagaimana program ini dilaksanakan oleh instansi teknis pemerintah (penyuluhan dan sosialisasi program PLKSDA-BM kepada anggota kelompok tani Talago Katiak). Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi anggota kelompok tani Talago Katiak dalam menjalankan program dan seberapa besar tingkat partisipasinya dalam menjalankan program tersebut. Dan untuk mengetahui apakah program PLKSDA- BM meningkatkan partisipasi anggota kelompok tani Talago Katiak dalam mengikutinya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Dengan demikian peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Talago Katiak pada Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) di Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar".**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan proses partisipasi anggota kelompok tani Talago Katiak dalam melaksanakan program PLKSDA-BM.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok tani Talago Katiak dalam melaksanakan program PLKSDA-BM.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi masukan, tambahan informasi dan pertimbangan dan sebagai perencana dalam pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang, serta perbaikan dan pengembangan proyek-proyek pembangunan daerah lebih partisipasi.
2. Bagi kelompok tani Talago Katiak, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat berperan lebih optimal dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bagi penulis, dapat meningkatkan pemahaman bahwa partisipasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan program-program pemberdayaan.